

Anies Baswedan Menolak, KPK Imbau Hadiah dari Ghana Dilaporkan

Reporter: M Rosseno Aji

Editor: Untung Widyanto

Sabtu, 7 Juli 2018 06:34 WIB



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menabuh bedug di Kantor Walikota Jakarta Selatan pada Kamis, 14 Juni 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Gubernur DKI Jakarta [Anies Baswedan](#) melaporkan hadiah yang dia terima dari pendakwah asal Ghana. KPK menyatakan biar pihaknya yang menentukan barang itu akan menjadi milik negara atau tidak.

"Sebaiknya memang dilaporkan. Kemudian kami (yang tentukan), kalau itu mau dijadikan barang milik negara itu lebih bagus," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Kuningan, Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018.

Baca juga: [Peluang Anies Baswedan Menantang Jokowi Makin Besar, Asal...](#)

Sebelumnya, saat menghadiri pertemuan ulama se-Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa, Anies Baswedan mendapat pemberian dari pendakwah asal Ghana, Muhammad Harun.

Harun memberikan sebuah tongkat berukir harimau di atasnya, kopiah, syal, dan dua kemeja khas Ghana.

Anies Baswedan mengatakan tak mau melaporkan pemberian itu. Dia beralasan Harun memberikan barang itu untuk Pemerintah Provinsi DKI, bukan untuk dirinya sendiri.

Anies Baswedan berencana menginventarisasi benda itu menjadi aset Pemprov dan meletakkan benda tersebut di Balai Kota DKI Jakarta.

Namun Saut mengatakan sebaiknya Anies Baswedan melaporkan pemberian itu kepada KPK. Dia mengatakan akan lebih bijak bila [Anies Baswedan](#) melaporkan terlebih dahulu pemberian tersebut. "Itu lebih bijak, nanti publik juga akan ikut menilai," katanya.

Peluang Anies Baswedan Menantang Jokowi Makin Besar,

Asal...

Reporter: **Vindry Florentin**

Editor: **Juli Hantoro**

Jumat, 6 Juli 2018 06:37 WIB



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik wali kota Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, dan pejabat tinggi DKI di Balai Kota Jakarta, 5 Juli 2018. Tempo/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Gubernur DKI Jakarta [Anies Baswedan](#) semakin ramai dibicarakan sebagai salah satu bakal calon penantang inkumben Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Pemilihan Presiden 2019.

Menurut CEO Saiful Mujani Research Center (SMRC) Djayadi Hanan Anies Baswedan termasuk salah satu kandidat potensial menjadi penantang Jokowi di Pilpres 2019. Namun peluangnya sangat tergantung banyak hal.

Baca juga: [JK Semobil dengan Anies, Zulkifli Hasan: Kan Bagus.](#)

Salah satunya tergantung solidnya koalisi oposisi Jokowi. Jika oposisi menghadirkan lebih dari satu calon, maka kubu Jokowi bakal makin sulit dikalahkan.

Untuk bisa membentuk koalisi yang solid melawan Jokowi, Djayadi mengatakan Anies butuh dukungan sosok besar. "Kalau Anies maju jadi calon presiden, itu berarti harus

mendapatkan endorsement dari tokoh utama di luar Jokowi sekarang yaitu Pak Prabowo," kata dia di kantornya, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.

Menurut Djayadi, jika Prabowo mundur dari pencalonan dan mendukung mantan Rektor Universitas Paramadina itu, maka peluang Anies akan lebih besar. "Suara untuk Prabowo bisa dialihkan untuk Anies," ujarnya.

Namun dukungan partai tak berarti segalanya. Djayadi menuturkan [Anies Baswedan](#) masih harus mengalahkan elektabilitas Jokowi. Berdasarkan survei SMRC, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah saat ini masih positif.

Baca juga: [Pendukung Akan Deklarasi Anies Maju Pilpres 2019](#)

Djayadi mengimbau para partai oposisi Jokowi berhati-hati menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan didukung. Persatuan partai yang melawan Jokowi menjadi kunci penting. "Kalau non inkumben mau menang, calonnya harus satu aja," katanya.

Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2019 bakal digelar pada 4-10 Agustus 2018. Saat ini inkumben Jokowi didukung PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, PPP, dan Partai Hanura, serta dua partai baru yaitu Perindo dan PSI.

Adapun kubu penantang Jokowi masih belum solid. Baru Gerindra dan PKS yang menyatakan akan berkoalisi. Itu pun dengan syarat posisi calon wakil presiden harus kader PKS. Sedangkan Partai Demokrat terus mewacanakan adanya poros ketiga. Namun menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, poros ketiga saat ini sangat sulit dibentuk.